

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi dari dulunya oleh negara Indonesia yaitu masalah kemiskinan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di semua sektor pembangunan, pemerataan pembangunan secara optimal, perluasan tenaga kerja dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh, perlu memiliki: peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Menurut (Yacoub, 2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak negara.

Upaya pengentasan kemiskinan terdapat dua strategi yang harus di tempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari berbagai bidang. Kedua, melakukan pelatihan kepada mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Royat, 2015). Proses pembangunan memiliki beberapah tahapan yaitu

meningkatnya serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, meningkatnya angka standar hidup dan meluasnya pilihan – pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta secara keseluruhan ( Todaro dan Smith, 2006). Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan serta kebutuhan masing-masing daerah. Pembangunan dimaksud tetap harus mengacu pada sasaran strategis nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang ingin dicapai.

Menurut teori Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan kapasitas jangka panjang suatu negara dalam memenuhi barang-barang ekonomi penduduknya. Kenaikan tersebut ditentukan oleh kenaikan faktor produksi. Penambahan faktor produksi tidak selalu diikuti dengan peningkatan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Potensi peningkatan produksi biasanya lebih besar dari peningkatan produksi yang sebenarnya. Kemiskinan menjadi salah satu hal yang mendasar dan pusat perhatian di negara manapun. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang tidak hanya dialami oleh negara yang berkembang, namun juga bagi negara maju termasuk Indonesia tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di setiap negara. Di hampir semua negara berkembang, taraf hidup mayoritas penduduknya cenderung sangat rendah, jika dibandingkan dengan taraf hidup masyarakat di negara kaya, atau dengan elite di negaranya sendiri. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit di atasi dalam pembangunan suatu negara terutama bagi negara berkembang, seperti

Indonesia. Kemiskinan memiliki konsep yang fleksibel sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Pengertian kemiskinan juga merupakan suatu kondisi dimana individu atau masyarakat dalam suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, seperti sandang dan pangan. Selain sandang dan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pendapatan juga menjadi indikator bahwa seseorang atau masyarakat dikatakan miskin. Bahkan saat ini kemiskinan telah memiliki standarnya.

Mubyarto (2004) mengatakan bahwa kemiskinan digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok atau kebutuhan hidup yang minimum yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dalam definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensional, artinya kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Dilihat dari aspek primer kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder mencakup miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber sumber keuangan dan terbatasnya informasi. Kesejahteraan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kemiskinan.

Tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan, pendidikan dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita,2015). Pada dasarnya problematika kemiskinan ialah permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya- upaya pengentasan kemiskinan

harus dilakukan dengan cara berkesinambungan, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakannya secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Sumatera Utara merupakan provinsi tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN Perkebunan yang arealnya terdapat di Sumatra Utara, antara lain PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III dan PTPN IV. Selain itu Sumatera Utara juga tersohor karena luas perkebunannya. Perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Namun, meskipun Sumatera Utara merupakan provinsi tersohor tetapi kemiskinan tinggi.

**Gambar 1. 1 Grafik Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara**



**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

Selanjutnya berdasarkan grafik sebagaimana pada gambar 1.1 terlihat bahwa terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan. Terdapat tiga (3) fase turun naik

yang terjadi, pada fase pertama dari tahun 2006 sebanyak 1.979 ribu jiwa lalu di tahun 2007 menurun sebanyak 1.768 ribu jiwa. Fase kedua di tahun 2008 sebanyak 1.613 ribu jiwa cenderung menurun hingga tahun 2014 sebanyak 1.360 ribu jiwa dan di tahun 2015 meningkat lagi sebanyak 1.508 ribu jiwa. Fase ketiga terjadi penurunan pada tahun 2016 sebanyak 1.452 ribu jiwa hingga tahun 2019 sebanyak 1.508 ribu jiwa, dan meningkat lagi tahun 2020 sebanyak 1.356 ribu jiwa. Pada pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab naiknya angka kemiskinan di Sumatera Utara. Akibatnya terjadi ketimpangan distribusi kesenjangan pembangunan dan pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Produk Domestik Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori Sukirno (2011) yang menyatakan bahwa :

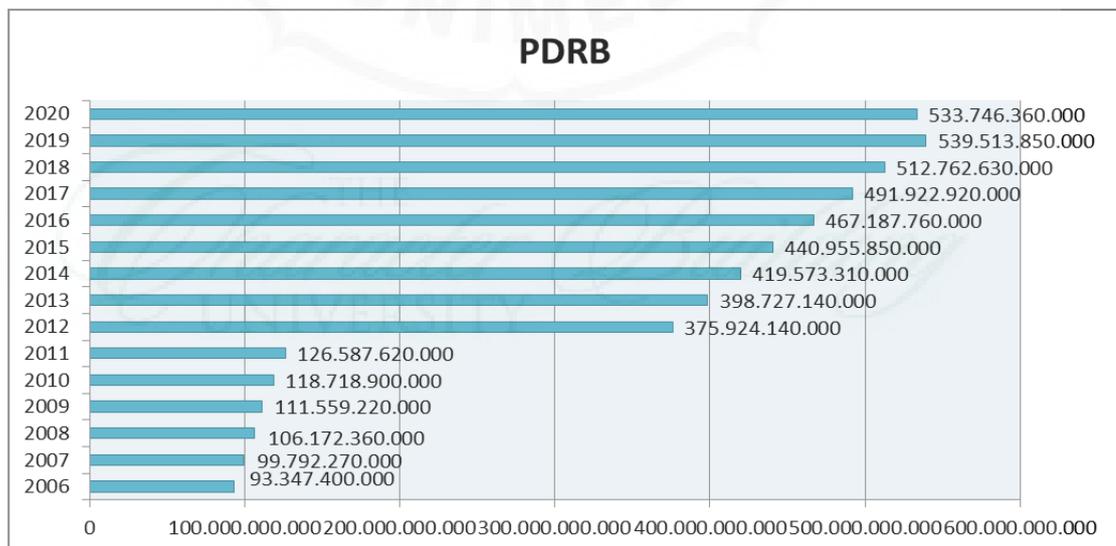
“Pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dan membuatnya sejahtera”.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDRB) atau pendapatan atau *output* per kapita. Produk Domestik Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi secara keseluruhan pada jangka waktu tertentu tertentu di suatu wilayah. Suatu negara dapat menggunakan PDRB sebagai indikator perekonomiannya. Terdapat kekuatan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yakni cepatnya pertumbuhan akan memberikan akibat buruk terhadap

masyarakat miskin karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural dan pertumbuhan modern.

Ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa konsentrasi penuh untuk pengentasan kemiskinan akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah akan habis untuk penanggulangan kemiskinan sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan melambat (Todaro, 2000). Siregar dan Wahyuniarti (2008) berpendapat, syarat keharusan (*necessary condition*) dalam mengurangi kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk syarat kecukupan (*sufficient condition*) adalah bahwa pertumbuhan tersebut berjalan efektif dalam mengurangi kemiskinan. Dengan artian, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan termasuk golongan penduduk miskin (*growth with equity*).

**Gambar 1. 2 Grafik PDRB di Provinsi Sumatera Utara**



**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

Gambar 1.2 di atas mendeskripsikan mengenai pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Bruto

(PDRB) menggambarkan salah satu faktor untuk melihat keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau disuatu wilayah. Tingginya aktivitas barang dan jasa merupakan pernyataan atas tingginya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data PDRB. Di Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, yang mana tiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2006 yaitu sebesar 93.347.400.000 milyar rupiah kenaikan ini hingga tahun 2020 sebesar 546.166.960.000 milyar rupiah.

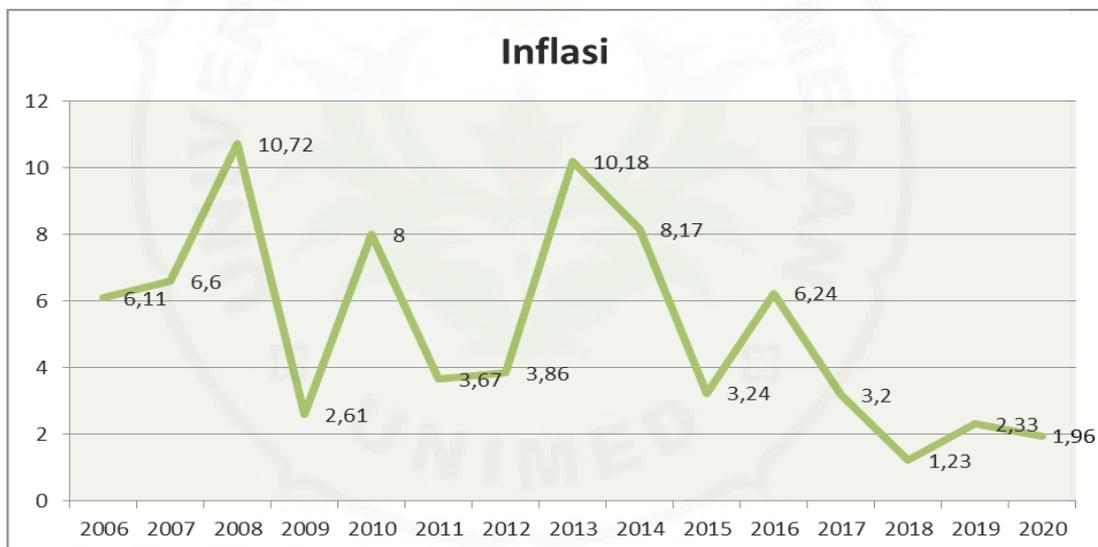
Pembangunan dalam suatu lingkup tidak selalu adil. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai belum mampu memberantas apa yang timbul akibat pembangunan yang tidak adil, pada saat yang sama di beberapa daerah pertumbuhan ekonomi terjadi secara perlahan. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan, karena keterbatasan sumberdaya.

Selanjutnya, ketersediaan alokasi investasi yang tidak merata di beberapa daerah, inflasi yang berbeda antar daerah, secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dan disparitas pendapatan antar daerah tersebut. Inflasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus, atau bisa juga disebut gejala ketidak seimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia, jumlah uang yang beredar lebih besar dibanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Menurut teori Keynes inflasi terjadi dikarenakan suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses

perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (inflationary gap). Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan didukung oleh teori Sadono Sukirno (2010:338) :

“Kenaikan harga-harga yang tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk ke atas keatas kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat”.

**Gambar 1. 3 Grafik Inflasi Provinsi Sumatera Utara**



**Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)**

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa inflasi di Provinsi Sumatera Utara terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2006 inflasi mencapai 6,11%, dan di tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 10,72% dimana kenaikan harga barang itu dirasakan oleh masyarakat, inflasi di Provinsi Sumatera Utara juga mengalami penurunan di tahun 2015 yaitu 3,24% dan di tahun 2020 mengalami penurunan drastis sebesar 1,96%. Disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah proses pembangunan nasional juga ditentukan oleh

investasi. Pembangunan nasional merupakan salah satu cara membuka pintu investasi bagi investor (Lubis, dkk. 2008). Pengaruh investasi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja masih akan berpengaruh terhadap hal lain. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Dengan meningkatkan investasi pemerintah, diharapkan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pendapat Suparmoko (1998), investasi merupakan pengeluaran yang diberlakukan guna menambah atau mempertahankan persediaan kapital (capital stock). Capital stock bukan hanya dalam bentuk modal atau fisik namun sumber daya manusia atau modal tenaga kerja tak luput pula masuk dalam bentuk tersebut. Penanaman modal yang tepat dalam jangka panjang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

**Gambar 1. 4 Grafik Investasi di Provinsi Sumatera Utara**



**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)**

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa terjadi fluktuasi pada tahun 2009 terjadi kenaikan sebesar 12.382.830 juta rupiah dan terjadi penurunan di tahun 2010 sebesar 4.624.700 juta rupiah dan melambung naik pada tahun 2018 sebesar 31.981.100 juta rupiah dan pada tahun 2019 terjadi penurunan hebat hingga di tahun 2020 sebesar 19.164.290 juta rupiah. Peningkatan investasi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat akan meningkat. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, akan mengurangi jumlah masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Dengan demikian masyarakat yang berada di garis kemiskinan tadi dapat meningkatkan gizi, pendidikan bagi anak-anak, dan dapat menabung untuk masa depan (Adventuna 2012).

Pembangunan di dalam suatu lingkup memang tidak selalu adil. Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai tidak mampu untuk membasmi yang muncul akibat belum adilnya pembangunan, bersamaan di beberapa daerah

pertumbuhan ekonomi terjadi secara lambat. Daerah tersebut tidak mengalami perkembangan dan kemajuan, disebabkan oleh minimnya sumberdaya yang dimiliki. Selanjutnya tersedianya inflasi yang membuat harga harga tidak selalu stabil, alokasi investasi yang tidak merata di sebagian daerah secara keseluruhan akan mempengaruhi tingkat kemiskinan dan disparitas pendapatan antar daerah tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI DAN INVESTASI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA (TAHUN 2006-2020)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapatmeidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan terus menerus pada Produk Domestik Bruto (PDRB) harga konstan.
2. Terjadi fluktuasi pada inflasi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun, mengakibatkan harga barang tidak stabil.
3. Investasi di provinsi Sumatera Utara terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk memusatkan serta mendalami penelitian, penulis memperkecil cakupan pembahasan dalam penelitian ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan Produk Domestik Bruto (PDRB), Inflasi dan Investasi yang dapat mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006-2020.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020?
2. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020?
3. Apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020?
4. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Investasi terhadap Kemiskinan secara simultan di Provinsi Sumatera tahun 2006-2020?

#### **1.5 Tujuan Masalah**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2006-2020.
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Investasi terhadap Kemiskinan secara simultan di Provinsi Sumatera tahun 2006-2020.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk penulis : penelitian ini sebagai pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu ataupun teori yang penulis dapatkan selama perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang penulis tempuh.
- b. Untuk pemerintah : penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi kebijakan dan pengambil keputusan dalam merumuskan dan merencanakan arah pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk akademisi : penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai Kemiskinan.
- d. Untuk masyarakat : penelitian dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor dan pengaruh dari Pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat dapat menyiapkan diri dan mengambil langkah tepat untuk mengembangkan potensi diri dan merencanakan apa yang harus dipersiapkan dimasa mendatang.